



Tantangan Kota Inklusif

YOGYA berkomitmen wujudkan 'kota inklusif'. Demikian judul berita di KR, (hal. 2, 23/10). Sebagai yang merasa 'wong Yogya' tentu saja ikut bangga dan berharap agar kota inklusif yang sebenarnya telah menjadi berita sejak tahun 2015-an itu, semakin terealisasi. Sebab dengan demikian, semua warga akan menikmati hasil pembangunan, atau 'city foar all'. Selama ini mungkin baru dapat dinikmati oleh kalangan yang 'sempurna' alias tak bercacat.

Karena dipublikasikan dengan kata 'inklusif' yang berasal dari kata bahasa asing - wajar jika banyak warga bertanya-tanya: apakah arti inklusif? Menurut pemahaman umum seperti yang banyak dikutip pada acuan rencana strategi pembangunan, inklusi merupakan model pendekatan untuk membangun dan mengembangkan suatu lingkungan yang semakin terbuka. Ini dipahami dengan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Tertutup dalam konsep lingkungan inklusif, berarti semua orang yang tinggal, berada, dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Selama ini, memang jarang orang memperbincangkan, apalagi menyebutkan indikatornya. Ketika kuliah Sosiologi Perkotaan, tidak ada yang menyebut 'kota inklusif'. Namun ternyata saat ini banyak kawasan yang mengklaim sendiri sebagai 'kota inklusif'. Menurut Bappenas, ada empat indikator kota inklusif, yakni: adanya partisipasi difabel, adanya upaya pemenuhan hak-hak difabel, terjaminnya aksesibilitas, dan adanya sikap inklusif warga kotanya.

Siapa warga Yogyakarta untuk menjadi warga Kota Inklusif? Sebab mewu-

judkan kota inklusif, tidak dapat berhenti pada perencanaan dan kebijakan yang bersifat fisik. Hal yang paling berat/sulit adalah mengajak warga untuk memiliki kesadaran mampu memandang perbedaan sebagai suatu hal yang tidak perlu dipersoalkan, namun memberi solusi agar setiap warga mampu menikmati kesejahteraan.

Perlu rancangan sosialisasi yang strategis dan efisien, untuk memahamkan masyarakat inklusif yang saling bertanggung jawab untuk mengupayakan dan menyediakan kemudahan berupa bantuan layanan dan sarana agar masing-masing di antara kita dapat terpenuhi kebutuhannya, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Masyarakat yang terbuka bagi semua tanpa terkecuali, yang universal tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras dan ideologi. Masyarakat yang ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan.

Sedang secara fisik, kota inklusif merupakan kota yang dapat menyediakan layanan dan sarana bagi semua warga masyarakat. Tetapi, tidaklah bisa sama untuk semua orang walaupun mereka tinggal dalam satu lingkungan masyarakat. Hal itu karena setiap individu dalam masyarakat unik dan berbeda. Dengan demikian maka setiap orang dalam masyarakat membutuhkan cara berbeda berupa layanan dan sarana khusus yang sesuai dan tepat dengan keunikan dan kebutuhan khususnya.

Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendukung inisiasi para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk menjadikan daerahnya menjadi kota inklusif. Bahkan kota inklusif dinyatakan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, sangat mendesak. Bappenas bahkan mengingatkan kota-kota di Indonesia menjadi liveable city atau kota yang nyaman ditinggali bagi seluruh warganya. Nah, Yogyakarta ditantang untuk menjadi teladan dalam mewujudkan Kota Inklusif. □ - o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005